

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Amerika Serikat (1998), ASCE telah mempublikasikan beberapa laporan struktur dan sejumlah laporan status yang dimutakhirkan datanya sehingga berpotensi untuk memberi solusi dalam peningkatan infrastruktur pada masa yang akan datang. Laporan infrastruktur tersebut telah disitasi dalam berbagai tulisan artikel dan laporan studi akademik, pemimpin politik telah memanfaatkan untuk membuat kebijakan dalam pengadaan infrastruktur di negara bagiannya. Dalam mengembangkan infrastruktur di negaranya, ASCE telah membentuk panel pakar yang terdiri dari berbagai bidang konsentrasi infrastruktur yang memiliki reputasi nasional untuk menentukan lingkup dan penilaian, juga anggaran yang dibutuhkan. Hal yang sama sudah terjadi di Australia tahun 2001 yang mulai menggunakan model Amerika Serikat untuk membuat penilai infrastruktur di Australia.

Laporan infrastruktur Fragile Foundation: A Report on America's Public Works (1998), melaporkan isu yang merekomendasi bagaimana negara meningkatkan kemampuan infrastrukturnya dalam melayani kegiatan masyarakat. Untuk memandu studi tersebut, para penulis laporan tersebut menyusun baseline untuk mengevaluasi infrastruktur yang terdiri dari delapan kategori infrastruktur dengan memuat tingkatan penilaian berdasarkan kinerja

dan kapasitas infrastruktur yang ada. Pada tahun 1988, rata-rata nilai infrastruktur masih pada tingkatan C, yang artinya menunjukkan pencapaian berada pada tingkatan cukup. Hal ini dikarenakan banyak ditemukan kemacetan lalu lintas dan kemampuan dalam pemeliharaan untuk menghadapi umur infrastruktur yang semakin tua. Sehingga para anggota komisi mengusulkan investasi fiskal yang dapat menunjang biaya operasi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Di Indonesia, studi semacam ini belum pernah dilakukan. Sekalipun pemerintah SBY sudah membentuk MP3 AI untuk pengembangan daerah tertinggal, kebutuhan infrastruktur tidak diketahui secara pasti bagaimana perkiraan kebutuhan dan pembiayaannya. Maka timbul masalah, misalnya di Papua sudah dibuatkan jalan, namun jarang sekali jalan itu digunakan karena masih sepi dan sumber daya tidak digunakan secara baik di tempat itu.

Report Card di Amerika Serikat telah di sitasi dari berbagai artikel dan laporan studi akademik. Pemimpin politik nasional maupun lokal telah memanfaatkan untuk membuat kebijakan dalam pengadaan infrastruktur di negara atau negara bagiannya. Untuk mengembangkan infrastruktur di negaranya, ASCE membentuk panel pakar yang terdiri dari berbagai bidang konsentrasi infrastruktur yang memiliki reputasi nasional untuk menentukan lingkup dan penilaian, juga anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan infrastruktur pada masa mendatang.

Konsep untuk membuat laporan instruktur bermula dari tahun 1988 dengan membuat komisi nasional untuk pengembangan pekerjaan umum. Saat

itu berjudul *Fragile Foundation: A Report on America's Public Works*, komisi tersebut melaporkan isu yang merekomendasi bagaimana negara meningkatkan kemampuan infrastrukturnya dalam melayani kegiatan masyarakat. Komisi tersebut kemudian melakukan studi yang berkaitan dengan bagaimana meningkatkan infrastruktur. Untuk memandu studi tersebut, para penulis laporan tersebut telah menyusun baseline untuk mengevaluasi infrastruktur.

Laporan awal tersebut terdiri dari delapan kategori infrastruktur dan memuat tingkatan penilaian berdasarkan kinerja dan kapasitas infrastruktur yang ada. Ketika laporan tersebut dikeluarkan pada tahun 1988, rata-rata nilai infrastruktur masih pada tingkatan C, menunjukkan pencapaian berada pada tingkat cukup. Pada saat itu, masalah yang banyak ditemukan pada infrastruktur adalah kemacetan lalu lintas dan kemampuan dalam pemeliharaan untuk menghadapi umur infrastruktur yang semakin tua. Oleh karena itu para anggota komisi mengusulkan infestasi fiskal yang dapat menunjang biaya operasi dan kebutuhan masa mendatang.

Sejak dikeluarkannya laporan infrastruktur pada tahun 1988, studi ASCE selanjutnya menunjukkan bahwa pada dekade berikutnya nilai infrastruktur di Amerika semakin parah dan tingkat nilai berkurang rata-ratanya. Berkurangnya tingkatan nilai rata-rata disebabkan oleh menurunnya nilai infrastruktur sekolah, penyedia air bersih, jalan, dan dam. Nilai tersebut mengejutkan anggota komisi, banyak praktisi dan pengamat dari anggota masyarakat yang peduli pada infrastruktur.

Laporan tahun 2001, menunjukkan adanya peningkatan ke nilai D+, namun pada tahun 2005 kembali turun ke D. Hasil laporan tersebut diketahui bahwa terjadi hal yang sama pada laporan awal di tahun 1988 yaitu masalah pemeliharaan dan ketidakmampuan penyediaan dana dalam proses pengembangan infrastruktur sehingga ASCE mengusulkan biaya sebesar triliunan dollar untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur beserta pemeliharannya agar dapat berfungsi dan berjalan dengan baik.

Bila hal ini terjadi di negara adidaya seperti Amerika Serikat, demikian juga dapat terjadi di Indonesia. Di negara kita tidak pernah ada studi mengenai infrastruktur, meskipun disadari kecukupan infrastruktur akan membantu aktifitas usaha pembangunan ekonomi masyarakat. Seperti kegiatan Infrastructure Summit yang diselenggarakan sejak tahun 2004. Indonesia International Infrastructure and Exhibition 2012 (IIICE2012), memberikan pandangan yang kritis untuk industri infrastruktur seperti Energi Pembangkit Daya dan Distribusi, Teknologi informasi dan komunikasi, Transportasi jalan, udara, laut dan air serta dan manajemen air dan limbah. Penilai kelayakan infrastruktur merupakan suatu program ASCE untuk memberi data dan mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di negaranya.

infrastruktur memiliki posisi yang amat penting bagi keberlangsungan kegiatan penduduk suatu wilayah. Kegiatan penduduk dapat ditampung dalam ruang ruang sarana sosial dan ekonomi, tetapi tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh pelayanan infrastruktur yang memadai. Sebagai contoh,

kegiatan perekonomian penduduk suatu wilayah mungkin dapat ditampung pada ruang-ruang 2 yang berupa sarana perekonomian, seperti kawasan perdagangan, jasa, dan industri yang dimiliki oleh wilayah tersebut, tetapi tanpa dukungan penyediaan jaringan infrastruktur yang baik, sebagai contoh seperti jaringan jalan, air bersih, pembuangan sampah, drainase, dan sanitasi, kegiatan tersebut tidak dapat berjalan dengan optimal. Kegiatan perekonomian suatu wilayah yang didukung oleh pelayanan infrastruktur yang baik, dapat mendorong peningkatan intensitas dan kualitas kegiatan tersebut, yang berakibat pada peningkatan kesejahteraan penduduknya (Button, 2002 dalam Hadi Wahyono, 2006).

Menurut Catanese, Anthony J., dan Jamse C.S (1979:120) dalam bukunya Perencanaan Kota, bahwa keberadaan infrastruktur ini mempunyai dampak yang sangat besar bagi mutu kehidupan masyarakat, pola pertumbuhan dan prospek perkembangan ekonominya. Namun sejauh ini tidak disadari oleh masyarakat. Terlihat banyak infrastruktur dan sarana lingkungan yang dibangun oleh pemerintah kurang mendapat perhatian dari masyarakat dalam hal pemeliharaannya.

Infrastruktur ini berfungsi untuk pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Dalam kaitan dengan persoalan pengembangan wilayah, kegagalan pembangunan infrastruktur lebih disebabkan karena tidak melibatkan masyarakat sebagai pengguna ruang baik dalam hal perumusan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pemeliharaannya. Mengingat infrastruktur merupakan unsur strategis dalam mewujudkan struktur

pertumbuhan dan perkembangan suatu kota, dan merupakan pendukung bagi perkembangan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial perkotaan. Maka infrastruktur ini harus dikenali dalam kaitan dengan kegiatan dan fungsi sosial dan ekonomi wilayah yang didukung dan dipelopornya. Misalnya kualitas lingkungan perumahan dipengaruhi oleh kualitas lingkungan fisik, kualitas dan tingkat penyediaan fasilitas pelayanan (infrastruktur), serta keberadaan tingkah laku sosial masyarakatnya. Melihat pentingnya pembangunan infrastruktur permukiman ini, maka keberadaannya ini harus benar-benar tepat guna, artinya tepat tempatnya dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Dalam merumuskan perencanaan, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman yang menjadi prasyarat untuk dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman sesuai kebutuhan masyarakat baik yang mampu disediakan maupun tidak oleh pemerintah. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Pendanaan

Dana tersebut mutlak tersedia sehingga keberadaannya menjadi prioritas utama. Dengan keterbatasan dana inilah maka muncul urutan prioritas dari apa yang akan dibangun, sehingga perencanaan yang matang menjadi acuan untuk menghindari kegagalan pelaksanaan pembangunan.

2. Kelembagaan

Keberadaan lembaga pengelola yang menangani masalah perencanaan infrastruktur harus ditunjang oleh kemampuan manajemen pengelolaan. Mulai

dari siapa yang merencanakan, melaksanakan, sampai pada yang memelihara hasilnya nanti.

3. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakatnya juga dapat menentukan perencanaan infrastruktur permukiman untuk wilayahnya. Masyarakat berpenghasilan tinggi akan membutuhkan infrastruktur yang berbeda dengan masyarakat berpenghasilan rendah, baik dalam kualitas maupun jenisnya.

4. Kemampuan Teknis

Kemampuan teknis yang tinggi dari perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman, tidak saja akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik, namun dapat pula menekan biaya pembangunan. Kemampuan teknis ini diperlukan dalam suatu perencanaan pembangunan infrastruktur mengingat dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur selalu tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan.

5. Kondisi Fisik Lingkungan

Fisik lingkungan akan mempengaruhi sistem perencanaan, topografi yang datarakan lebih mudah direncanakan dari pada yang terlalu curam. Selain topografi, kondisi fisik lingkungan yang mempengaruhi perencanaan infrastruktur permukiman adalah hidrologi, curah hujan, geologi tata lingkungan dan struktur tanah.

6. Bencana Alam

Faktor bencana alam sangat diperlukan sebagai pertimbangan dalam merancang dan membangun infrastruktur. Untuk mengurangi kerusakan akibat

bencana makaharus memperhatikan konfigurasi (bentuk, ukuran, ketinggian, dan orientasinya) , intensitas dan frekuensi ancaman bencana di suatu wilayah, standarstandar rancangan struktural dan non struktural, pilihan bahan/material inti dan pendukung serta kualitas konstruksinya.

7. Peran serta Masyarakat

Pengembangan infrastruktur suatu kota/wilayah tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan, walaupun penentu kebijakan masih merupakan kewenangan pemerintah. Partisipasi masyarakat diartikan keikutsertaan, keterlibatan, dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan program dan evaluasi. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung dapat berupa sumbangan pemikiran, pendanaan dan material yang diperlukan.

Sebagai provinsi baru yang sedang berkembang, penilaian infrastruktur yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sangatlah penting. Dengan infrastruktur yang masih terbatas jangkauan pelayanannya, laporan ini akan sangat membantu pemerintah Provinsi maupun Daerah untuk memantau sejauh mana kemampuan dan potensi infrastrukturnya dalam menghadapi perkembangan provinsi dan daerahnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengetahui kelayakan infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan sosial di Provinsi Kalimantan Utara.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menilai sampai sejauh mana kelayakan infrastruktur menurut para insinyur teknik sipil dapat mendukung kegiatan sosial dan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara serta memberikan informasi biaya yang dibutuhkan.

1.4 Ruang Lingkup

Infrastruktur yang akan dimasukkan dalam laporan ini meliputi : pelabuhan udara, pelabuhan laut, jembatan dan jalan, air minum, telekomunikasi, listrik, sekolah dan universitas di provinsi kalimantan utara.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Sebagai sarana yang dapat digunakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengontrol dan mengembangkan infrastrukturnya.

2. Sebagai tolok ukur yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk menyusun APBD.

1.6 Keaslian Tugas Akhir

Berdasarkan data tugas akhir di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tugas akhir dengan judul Analisis Kelayakan Infrastruktur di Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Penilaian Praktisi dan Akademisi Teknik Sipil belum pernah dilakukan sebelumnya.